

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Tentang Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Sedangkan menurut para ahli pengertian pemahaman adalah sebagai berikut: Suharsimi (2009:118) menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Pemahaman menurut Sadiman (1996:109) adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Sementara itu, pengertian pemahaman menurut Anas Sudijono (1997), adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.

Menurut Nana Sudjana (1992: 24) pemahaman dapat dibedakan dalam tiga kategori antara lain : (1) tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan prinsip-

prinsip, (2) tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok, dan (3) tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ekstrapolasi. Oleh karena itu maka pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk memahami serta mengingat kembali apa yang telah dia terima sebelumnya.

2. Tinjauan Nilai – Nilai Pancasila

a. Pengertian Nilai

Nilai atau “*Value*” (bhs. Inggris) termasuk bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat yaitu filsafat nilai (*Axiology, Theory of Value*). Filsafat sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya “keberhargaan”(Worth) atau “kebaikan” (*goodness*), dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.

Muchson AR (2000 : 16) mendefinisikan nilai yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *value* sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Maksudnya adalah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Sementara itu, menurut Mulyana (2004: 24) nilai merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga melahirkan tindakan pada diri seseorang. Nilai tersebut pada umumnya mencakup tiga wilayah, yaitu nilai

intelektual (benar-salah), nilai estetika (indah-tidak indah), dan nilai etika (baik-buruk). Sementara itu, menurut Kaelan (2002 : 123), nilai itu pada hakekatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu.

b. Bentuk dan Susunan Pancasila

1) Bentuk Pancasila

Bentuk Pancasila di dalam pengertian ini diartikan sebagai rumusan Pancasila sebagaimana tercantum di dalam alinea keempat Pembukaan UUD'45. Pancasila sebagai suatu sistem nilai mempunyai bentuk yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Merupakan kesatuan yang utuh, semua unsur dalam Pancasila menyusun suatu keberadaan yang utuh. Masing-masing sila membentuk pengertian yang baru. Kelima sila tidak dapat dilepas satu dengan lainnya. Walaupun masing-masing sila berdiri sendiri tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang harmonis.
- b) Setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur yang komplementer. Artinya, salah satu unsur (sila) kedudukannya tidak lebih rendah dari yang lain. Walaupun sila Ketuhanan merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan sebagai *causa prima*, tetapi tidak berarti sila lainnya hanya sebagai pelengkap.

c) Sebagai suatu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah atau dikurangi. Oleh karena itu Pancasila tidak dapat diperas, menjadi trisila yang meliputi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan, atau eka sila yaitu gotong royong sebagaimana dikemukakan oleh Ir. Soekarno.

2) Susunan Pancasila

Pancasila sebagai suatu sistem nilai disusun berdasarkan urutan logis keberadaan unsur-unsurnya. Oleh karena itu sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) ditempatkan pada urutan yang paling atas, karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadaNya. Tuhan dalam bahasa filsafat disebut dengan *Causa Prima*, yaitu **Sebab Pertama**, artinya sebab yang tidak disebabkan oleh segala sesuatu yang disebut oleh berbagai agama dengan “Nama” masing-masing agama.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ditempatkan setelah Ketuhanan, karena yang akan mencapai tujuan atau nilai yang didambakan adalah manusia sebagai pendukung dan pengemban nilai-nilai tersebut. Manusia yang bersifat monodualis, yaitu yang mempunyai susunan kodrat yang terdiri dari jasmani dan rohani. Makhluk jasmani yang unsur-unsur: benda mati, tumbuhan, hewan. Rohani yang terdiri dari unsur: akal, rasa, karsa. Sifat kodrat manusia, yaitu sebagai makhluk individu, dan makhluk sosial. Kedudukan kodrat, yaitu sebagai makhluk otonom, dan makhluk Tuhan.

Setelah prinsip kemanusiaan dijadikan landasan, maka untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan manusia-manusia itu perlu untuk bersatu membentuk masyarakat (negara), sehingga perlu adanya persatuan (sila ketiga). Persatuan Indonesia erat kaitannya dengan nasionalisme. Rumusan sila ketiga tidak mempergunakan awalan ke dan akhiran an, tetapi awalan per dan akhiran an. Hal ini dimaksudkan ada dimensi yang bersifat dinamik dari sila ini. Persatuan atau nasionalisme Indonesia terbentuk bukan atas dasar persamaan suku bangsa, agama, bahasa, tetapi dilatarbelakangi oleh historis dan etis. Historis artinya karena persamaan sejarah, senasib sepenanggungan akibat penjajahan. Etis, artinya berdasarkan kehendak luhur untuk mencapai cita-cita moral sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu persatuan Indonesia, bukan sesuatu yang terbentuk sekali dan berlaku untuk selama-lamanya. Persatuan Indonesia merupakan sesuatu yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus menerus. Semangat persatuan atau nasionalisme Indonesia harus selalu dipompa, sehingga semakin hari semakin kuat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila keempat merupakan cara-cara yang harus ditempuh ketika suatu negara ingin mengambil kebijakan. Kekuasaan negara diperoleh bukan karena warisan, tetapi berasal dari rakyat. Jadi rakyatlah yang berdaulat.

Sila kelima Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia ditempatkan pada sila terakhir, karena sila ini merupakan tujuan dari negara Indonesia yang merdeka.

Oleh karena itu masing-masing sila mempunyai makna dan peran sendiri-sendiri. Semua sila berada dalam keseimbangan dan berperan dengan bobot yang sama. Akan tetapi karena masing-masing unsur mempunyai hubungan yang organis, maka sila yang diatas menjiwai sila yang berada dibawahnya. Misalnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila kedua, ketiga, keempat dan kelima. Demikian seterusnya untuk sila ketiga, keempat, kelima (Rukiyati, 2008:28).

c. Nilai-Nilai dalam Pancasila

Pancasila yang berisi seperangkat nilai-nilai dasar ideal, merupakan komitmen kebangsaan, identitas bangsa dan menjadi dasar pembangunan karakter keindonesiaan. Mendasarkan pada perspektif teori fungsionalisme struktural, sebuah negara bangsa yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan nilai bersama yang dapat dijadikan nilai pengikat integrasi (*integrative value*), titik temu (*common denominator*), jati diri bangsa (*national identity*) dan sekaligus nilai yang dianggap baik untuk diwujudkan (*ideal value*) (Winarno Narmatomojo, 2010: 1)

Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Kelima nilai ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tak terpisahkan mengacu kepada tujuan

yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk kedalam nilai moral (nilai kebaikan) dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak.

Menurut Moerdiono (dalam Mulyono: 2-3) terdapat tiga tataran nilai dalam ideology Pancasila yaitu dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar yang berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.
- 2) Nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat konstektual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai Pancasila, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif

dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.

- 3) Nilai praksis, yaitu nilai yang terdapat dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara secara perseorangan.

Pancasila sebagai nilai yang termasuk nilai moral atau nilai kerohanian juga mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Hal ini bersumber dari dasar Pancasila, yaitu manusia yang mempunyai susuna kodrat, sebagai makhluk yang tersusun atas jiwa (rohani) dan raga (materi). Disamping itu Pancasila sebagai sistem nilai juga mengakui nilai-nilainya secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai kebenaran (epistemologis), estetis, etis, maupun nilai religius. Oleh karena itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat lengkap, karena terdiri dari nilai-nilai di atas.

d. Makna Sila Sila Pancasila

Dalam sila-sila yang terdapat dalam Pancasila mengandung arti dan makna sebagai berikut:

1) Arti dan Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa

- a) Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa
- b) Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya
- c) Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku
- d) Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia
- e) Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragam, toleransi umat antar umat dan dalam beragama
- f) Negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama

2) Arti dan Makna sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- a) Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya, kemanusiaan itu mempunyai sifat yang universal
- b) Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
- c) Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah.

3) Arti dan Makna sila Persatuan Indonesia

- a) Nasionalisme
- b) Cinta bangsa dan tanah air

- c) Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
 - d) Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit
 - e) Menumbuhkan rasa nasib sepenanggungan
- 4) Arti dan Makna sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
- a) Hakikat dari sila ini adalah demokrasi
 - b) Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama
 - c) Dalam melakukan keputusan diperlukan kejujuran bersama
- 5) Arti dan Makna sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- a) Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat
 - b) Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing
 - c) Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya
- (Rukiyati, 2008: 65-72)

e. Butir-butir pengamalan Pancasila

Butir-butir pengamalan Pancasila memang sudah dicabut oleh pemerintah, namun butir-butir tersebut masih relevan untuk dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini 45 Butir

Pengamalan Pancasila yang patut diamalkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

- a) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- f) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- g) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- a) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

- b) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- d) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- e) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- f) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- g) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- h) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- i) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- j) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3) Persatuan Indonesia

- a) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- b) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- c) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- d) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

- e) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 - f) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 - g) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- a) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 - b) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - d) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - e) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 - f) Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 - g) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - h) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

- i) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- j) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- a) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- b) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d) Menghormati hak orang lain.
- e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- f) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- g) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- h) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- i) Suka bekerja keras.
- j) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

- k) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

3. Tinjauan Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Lampiran Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang standar Isi Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. PKn adalah aspek pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Cholisin 2000: 9). Sementara itu, menurut Azra Azymurdi (1999:75) Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang cangkupannya luas lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM, karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal seperti pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, Rule of law, hak dan kewajiban warga negara, proses demokrasi, dan keterlibatan masyarakat madani, pengetahuan, lembaga- lembaga dan sistem hukum, pengetahuan tentang HAM, kewarganegaraan yang aktif dan sebagainya. Sementara itu, Arnie Fajar (2005: 141) menyatakan bahwa mata pelajaran kewarganagaraan merupakan

mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang dimanfaatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (*character building*) bangsa Indonesia yang antara lain:

- 1) Membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa.
- 3) Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab.

c. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Lampiran Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Nasional Menjelaskan bahwa ruang lingkup mata pelajaran PKn meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

- 1) Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
- 2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- 3) Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- 4) Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
- 5) Konstitusi Negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- 6) Kekuasaan dan Politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.

- 7) Pancasila meliputi: kedudukan pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka.
- 8) Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

4. Tinjauan Karakter

a. Pengertian Karakter

John M. Echols dan Hassan Shadly (2006:107) menyebutkan bahwa karakter berasal dari bahasa Inggris yaitu *character* yang berarti watak, karakter atau sifat.

Menurut Simon Philips, karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Sedangkan, Doni Koesoema memahami bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan.

Peterson dan Seligman mengaitkan secara langsung *character strength* dengan kebajikan. *Character strength* dipandang sebagai unsur-unsur psikologis yang membangun kebajikan (*virtues*). Salah satu kriteria utama *character strength* adalah bahwa karakter tersebut berkontribusi besar dalam mewujudkan sepenuhnya potensi dan cita-cita seseorang dalam

membangun kehidupan yang baik, yang bermanfaat bagi dirinya, orang lain, dan bangsanya (Fatchul Mu'in, 2011:160). Oleh karena itu karakter adalah sikap dan perilaku yang Nampak pada diri seseorang.

b. Pendidikan Karakter

Sebelum membicarakan pendidikan karakter maka akan diuraikan terlebih dahulu apa itu pendidikan. Menurut Yahya Khan (2010: 1) “Pendidikan merupakan sebuah proses yang menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, menata, dan mengarahkan”. Pendidikan juga berarti proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi dirinya dan juga lingkungannya. Pendidikan (education) dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin ‘*educare*’ berarti memasukkan sesuatu. Dalam konteks ini, makna pendidikan adalah menanamkan nilai-nilai tertentu ke dalam kepribadian anak didik atau siswa.

Doni A. Koesoema (2007:100) menyebutkan bahwa pendidikan karakter sudah dimulai dari Yunani. Dari zaman inilah dikenal konsep *arête* (kepahlawanan) dari bangsa Yunani, kemudian konsepsi Socrates yang mengajak manusia untuk memulai tindakan dengan “mengenal diri sendiri” dan “ilusi pemikiran akan kebenaran. Menurut Megawangi dalam buku Darmiyati (2009: 110) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai “Sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif pada lingkungannya”.

Menurut Lickona Pendidikan Karakter mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*) (Lickona, 1991:5). Aspek-aspek dari tiga komponen karakter adalah: *moral knowing*. Terdapat enam hal yang menjadi tujuan dari diajarkannya *moral knowing* yaitu 1) kesadaran moral (*moral awareness*), 2) mengetahui nilai moral (*knowing moral values*), 3) *perspective talking*, 4) penalaran moral (*moral reasoning*), 5) membuat keputusan (*decision making*), 6) pengetahuan diri (*self knowledge*). Unsur *moral knowing* mengisi ranah kognitif mereka.

Terdapat enam hal yang merupakan aspek dari emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yakni: 1) nurani (*conscience*), 2) penghargaan diri (*self esteem*), 3) empati (*empathy*), 4) cinta kebaikan (*loving the good*), 5) kontrol diri (*self control*), dan kerendahan hati (*humility*). *Moral action* perbuatan atau tindakan moral ini merupakan *out come* dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang untuk berbuat (*act morally*) maka harus dilihurus dilihat dari karakter yaitu kompetensi (*competence*), keinginan (*will*), dan kebiasaan (*habit*).

Ada empat jenis pendidikan karakter yang selama ini dikenal dan dilaksanakan dalam proses pendidikan, yaitu:

- 1) Pendidikan Karakter berbasis nilai religius, yang merupakan kebenaran wahyu Tuhan (konservasi moral).

- 2) Pendidikan Karakter berbasis nilai budaya, antara lain yang berupa budi pekerti, Pancasila, apresiasi sastra, keteladanan tokoh-tokoh sejarah dan para pemimpin bangsa.
- 3) Pendidikan Karakter berbasis lingkungan (konservasi lingkungan).
- 4) Pendidikan Karakter berbasis potensi diri, yaitu sikap pribadi, hasil proses kesadaran pemberdayaan potensi diri yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan (konservasi humanis) (Yahya Khan, 2010: 2).

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010) nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini:

- 1) Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat Bergama. Oleh karena itu, kehidupan individu masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah agama.
- 2) Pancasila : negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni.

Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.

- 3) Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.
- 4) Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai jalur satuan pendidikan diberbagai jalur dan jenjang. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Pendidikan karakter tentu mempunyai tujuan, tujuan dari pendidikan karakter menurut Nurul Zuriah (2007: 67) adalah sebagai berikut:

- 1) Siswa memahami nilai-nilai karakter dilingkungan keluarga, lokal, nasional, dan internasional melalui adat istiadat, hukum, dan undang-undang, dan tatanan antar bangsa.

- 2) Siswa mampu mengembangkan watak atau tabiatnya secara konsisten dalam mengambil keputusan budi pekerti di tengah-tengah rumitnya kehidupan bermasyarakat saat ini.
- 3) Siswa mampu menghadapi masalah nyata dalam masyarakat secara rasional bagi pengambilan keputusan yang terbaik setelah melakukan pertimbangan sesuai dengan norma budi pekerti atau karakter.
- 4) Siswa mampu menggunakan pengalaman budi pekerti atau karakter yang baik bagi pembentukan kesadaran dan pola perilaku yang berguna dan bertanggung jawab atas tindakannya.

Pengembangan nilai-nilai dan karakter diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP). Pengembangan nilai-nilai tersebut dalam silabus ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

- 1) Mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk menentukan apakah kandungan nilai-nilai dan karakter yang secara tersirat atau tersurat dalam SK dan KD di atas sudah tercakup didalamnya.
- 2) Menggunakan tabel 1 yang memperlihatkan keterkaitan antara SK/KD dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan.
- 3) Mencantumkan nilai-nilai dan karakter bangsa dalam tabel 1 tersebut kedalam silabus.
- 4) Mencantumkan nilai-nilai yang sudah tercantum dalam silabus ke RPP.

- 5) Mengembangkan proses pembelajaran peserta didik aktif yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan melakukan internalisasi nilai dan menunjukkannya dalam perilaku yang sesuai.
- 6) Memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan untuk internalisasi nilai mau pun untuk menunjukkannya dalam perilaku (Kemendiknas, 2010:18).

c. Ciri–Ciri Karakter

Karakter memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

- 1) Karakter adalah siapakah dan apakah kamu pada saat orang lain sedang melihat kamu (*character is what you are when nobody is looking*).
- 2) Karakter merupakan hasil dari nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan (*character is the result of values and beliefs*).
- 3) Karakter adalah sebuah kebiasaan yang menjadi sifat alamiah kedua (*character is a habit that becomes second nature*).
- 4) Karakter bukanlah reputasi atau apa yang dipikirkan oleh orang lain terhadapmu (*character is not reputation or what others think about you*).
- 5) Karakter bukanlah seberapa baik kamu daripada orang lain (*character is not how much better you are than others*).
- 6) Karakter tidak relatif (*character is not relatif*).

d. Unsur–Unsur Karakter

Ada beberapa unsur dimensi manusia secara psikologis dan sosiologis yang mempunyai kaitan dengan terbentuknya karakter pada manusia. Oleh karena itu karakter seseorang dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1) Sikap

Sikap seseorang biasanya adalah merupakan bagian karakternya, bahkan dianggap sebagai cerminan karakter seseorang tersebut. Tentu saja tidak sepenuhnya benar, tetapi dalam hal tertentu sikap seseorang terhadap sesuatu yang ada di hadapannya, biasanya menunjukkan bagaimana karakternya.

2) Emosi

Kata emosi diadopsi dari bahasa latin *emovere* (*e* berarti luar dan *movere* artinya bergerak). Sedangkan, dalam bahasa Prancis adalah *emouvoir* yang artinya kegembiraan. Emosi adalah bumbu kehidupan. Sebab, tanpa emosi, kehidupan manusia akan terasa hambar. Manusia selalu hidup dengan berpikir dan merasa. Emosi identik dengan perasaan yang kuat.

3) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan komponen kognitif manusia dari faktor sosiopsikologis. Kepercayaan bahwa sesuatu itu “benar” atau “salah” atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, dan intuisi sangatlah penting untuk membangun watak dan karakter manusia. Jadi, kepercayaan itu memperkuat eksistensi diri dan memperkuat hubungan dengan orang lain.

Kepercayaan memberikan perspektif pada manusia dalam memandang kenyataan dan ia memberikan dasar bagi manusia untuk mengambil pilihan dan menentukan keputusan. Jadi, kepercayaan

dibentuk salah satunya oleh pengetahuan. Apa yang kita ketahui membuat kita menentukan pilihan karena kita percaya apa yang kita ambil berdasarkan apa yang kita ketahui.

4) Kebiasaan dan Kemauan

Kebiasaan adalah komponen konatif dari faktor sosiopsikologis. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis, tidak direncanakan. Ia merupakan hasil pelaziman yang berlangsung pada waktu yang lama atau sebagai reaksi khas yang diulangi berkali-kali. Setiap orang mempunyai kebiasaan yang berbeda dalam menanggapi stimulus tertentu. Kebiasaan memberikan perilaku yang dapat diramalkan.

5) Konsepsi Diri

Hal penting lainnya yang berkaitan dengan pembangunan karakter adalah konsepsi diri. Orang yang sukses biasanya adalah orang yang sadar bagaimana dia membentuk wataknya.

Proses konsepsi diri merupakan proses totalitas, baik sadar maupun tidak sadar, tentang bagaimana karakter dan diri kita dibentuk. Konsepsi diri adalah bagaimana “saya” menempatkan diri dalam kehidupan. Konsepsi diri merupakan proses menangkai kecenderungan mengalir dalam hidup. Sehingga dengan mempunyai konsepsi diri, seseorang akan mempunyai pedoman dalam kehidupan. Hal tersebut tentu merupakan sesuatu yang penting dalam pembentukan karakter seseorang.

e. Karakter Menurut Kemendiknas

Terdapat beberapa karakter yang dirumuskan oleh Kemendiknas, berikut ini adalah nilai-nilai karakter tersebut:

1) Religius

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

2) Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

3) Toleransi

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

4) Disiplin

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

5) Kerja Keras

Tindakan yang menunjukkan perilaku pantang menyerah.

6) Kreatif

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

7) Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8) Demokratis

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9) Rasa Ingin Tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

10) Semangat Kebangsaan

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

11) Cinta Tanah Air

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

12) Menghargai Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

13) Bersahabat/Komunikatif

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

14) Cinta Damai

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

15) Gemar Membaca

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

16) Peduli Lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

17) Peduli Sosial

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

18) Tanggung Jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

B. Kerangka Berpikir

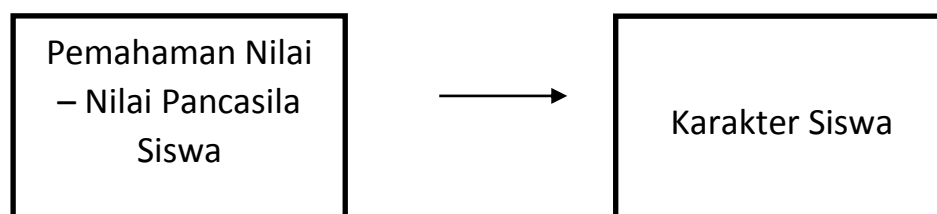
Setiap orang diharapkan mempunyai karakter yang baik. Dengan mempunyai karakter yang baik maka orang tersebut akan mempunyai perilaku yang baik. Karakter akan mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai bangsa Indonesia tentu saja kita juga harus memiliki karakter yang baik juga. Karakter yang relevan untuk dijadikan pedoman adalah karakter Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia mempunyai nilai-nilai karakter yang lengkap dan sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam pembentukan karakter. Karena sebenarnya karakter itu bisa dibentuk dan dikembangkan. Salah satunya melalui jalur pendidikan. Namun tidak semua sekolah menggelar pendidikan karakter, sehingga ini menjadi permasalahan tersendiri. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan untuk membentuk karakter siswa. Yakni karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai karakter juga diintegrasikan dalam setiap pembelajaran mata pelajaran.

Melalui materi Pancasila dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII maka hal ini akan meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila

siswa kelas VIII. Dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang baik maka siswa diharapkan akan mempunyai karakter yang baik juga dan sesuai dengan karakter Pancasila. Karena pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam pembentukan karakter siswa. Dengan pemahaman yang baik maka siswa diharapkan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga akan terbentuk karakter yang baik juga. Oleh karena itu pemahaman nilai-nilai Pancasila sangat penting karena akan mempunyai hubungan dengan karakter yang dimiliki oleh siswa.

Berikut ini adalah skema pemikiran peneliti:



Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir

Dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang baik maka hal tersebut diharapkan akan mempunyai hubungan yang positif dengan karakter yang dimiliki siswa. Sehingga dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang baik karakter yang dihasilkan juga baik. Begitu juga sebaliknya, jika pemahaman nilai-nilai Pancasila siswa buruk maka karakter yang dimiliki siswa tersebut akan buruk juga.

C. Hipotesis

Dari kajian teori dan kerangka berpikir diatas maka dapat dirumuskan jawaban sementara atas rumusan masalah dalam bentuk hipotesis sebagai berikut: Ada hubungan pemahaman nilai-nilai Pancasila dengan karakter siswa.